

# RESTRI

# YUNIASTUTI\_19440006\_S2

*by Restri Yuniastuti*

---

**Submission date:** 19-Sep-2023 11:01AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2170315801

**File name:** RESTRI\_YUNIASTUTI\_19440006\_S2.docx (2.09M)

**Word count:** 10460

**Character count:** 72990

TESIS  
EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN <sup>7</sup>DI DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN  
SETELAH PANDEMI COVID-19



Diajukan Oleh :

**RESTRI YUNIASTUTI**

NPM. 19440006

<sup>4</sup>**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2021**

## BAB I PENDAHULUAN

### 74 PENDAHULUAN

#### 2.1.Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, industri akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan laju yang semakin meningkat. Masyarakat umum menjadi semakin kritis untuk terus dapat meminta transparansi serta akuntabilitas oleh lembaga sector publik. Kemampuan untuk menunjukkan bukan hanya penggunaan uang publik yang dibelanjakan melainkan penggunaan uang publik secara efisien dan ekonomis merupakan salah satu aspek akuntabilitas. (Kurrohman, 2013).

Selama ini proses penyusunan hingga penetapan APBD hingga laporan pertanggungjawaban (LKPJ) cenderung fokus pada besarnya jumlah anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengatur tata kelolaan keuangan daerah, APBD mengait sistem anggaran berbasis kinerja, yang sudah tidak hanya melihat besar kecilnya anggaran, namun juga memperhatikan kinerja anggaran. Penggunaan anggaran hingga manfaat dari adanya anggaran dapat secara tepat pada sasaran program yang dibiayai (Natsir, 2008).

Peraturan yang baru yaitu <sup>11</sup> Peraturan APBN Tahun Anggaran 2020 menerangkan tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020 hingga 2024. Pelaksanaan RPJMN ini mendorong kebijakan fiskal untuk diarahkan pada percepatan kemajuan persaingan melalui beberapa bentuk inovasi serta kekuatan

kualitas sumber daya yang tersedia. Selain itu, mendorong birokrasi dan instansi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan bebas korupsi.

Upaya mencapai tujuan untuk dapat membentuk instansi pemerintahan yang dapat menunjukkan kinerja pelayanan yang optimal kepada masyarakat, penting untuk dapat menerapkan prinsip efektivitas (Putra dan Dhiniharitsa, 2020). Pencapaian target pada program yang sudah direncanakan oleh lembaga harus diukur melalui pengukuran kinerja agar proses pengambilan keputusan dapat tepat. Pada instansi pemerintahan, efektivitas menjadi perhatian utama karena adanya tuntutan menjadi *good corporate government*, yaitu terdapat keterbukaan serta tanggung jawab kepada masyarakat sebagai *stakeholders* agar kinerja dari instansi pemerintahan tersebut mengalami peningkatan (Tamasoleng, 2015). Salah ukuran kinerja adalah melalui anggaran belanja.

Anggaran belanja merupakan keluaran dari penganggaran. Menurut Putra dan Dhiniharitsa (2020), penganggaran dapat menjadi ukuran kemampuan sebuah instansi dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tujuan organisasi. Anggaran merupakan komponen penting dalam mengatur, mengawasi serta mengendalikan suatu asosiasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan dana publik serta melaksanakan program yang didanai publik pada organisasi sebagai bagian dari sektor publik. (Mardiasmo, 2018).

Berkaitan dengan anggaran, kemampuan sebuah instansi dalam mengelola anggaran menjadi prioritas penting yang dapat menunjukkan kinerja sebuah instansi



pemerintahan. Sorotan publik sendiri terhadap pengelolaan anggaran instansi pemerintahan tertuju pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran belanja yang rendah serta alokasi belanja tidak tepat (Fahlevi dan Ananta, 2015). Petunjuk ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai pelaksanaan belanja daerah. Program yang direncanakan akan semakin cepat terlaksana jika semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran. Di sisi lain, rendahnya tingkat asimilasi anggaran menyebabkan banyaknya dana menganggur yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah dan menjadi tidak efisien.

Fahlevi dan Ananta (2015) menerangkan dilain sisi, kecilnya penyerapan anggaran serta penyerapan anggaran yang besar terjadi pada akhir periode atau akhir tahun cenderung umum dilakukan oleh instansi pemerintahan, yang dapat memengaruhi hasil dan outcome yang diharapkan dari program yang sudah dirancang dan membuka peluang untuk menyalahgunakan anggaran. Kajian Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) menambahkan bahwa kualitas belanja yang dilakukan melalui penggunaan APBD masih rendah, yang ditunjukkan melalui besarnya porsi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung serta penyerapan anggaran yang masih rendah.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa efektivitas belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintahan masih rendah, karena tidak tepatnya alokasi belanja anggaran, dimana belanja untuk melaksanakan program lebih kecil daripada belanja untuk sarana pendukung. Permasalahan lainnya adalah pada sisi efektivitas anggaran, dimana realisasi anggaran belum optimal bila dibandingkan dengan target yang telah direncanakan (Fahlevi dan Ananta, 2015).

Kondisi lemahnya efektivitas hingga penyerapan anggaran dari instansi pemerintah ini kemudian memperoleh tantangan lanjutan pada 2020 dimana pandemi Covid-19 muncul. Penularan yang cepat dari virus Covid-19 ini membuat beberapa negara di dunia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan *lockdown*, diawal pandemi dan menerapkan pembatasan aktivitas sosial yang masih berlaku hingga akhir tahun 2021. Di awal masa pandemi Covid-19, Tepatnya, maret 2020, terdapat 14 orang meninggal dari 6.680 kasus baru penyakit virus Corona. Tetapi jumlah orang meninggal pada maret 2021 <sup>4</sup> menjadi 104 orang (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Hal ini menandakan virus Covid-19 menjadi pandemi yang dapat mengancam kesehatan dan mempengaruhi segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan sebuah negara.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah juga telah mengambil langkah dalam mencegah penularan virus Covid-19 melalui Arahan Presiden RI Tahun 2020 No.4 yang menjelaskan untuk melakukan *refocusing* aktivitas, merealokasi anggaran, serta mempercepat pengadaan barang ataupun jasa erat kaitannya terhadap penanganan pandemi Covid-19. Kondisi demikian juga menjadi salah satu alasan juga menentukan realisasi penyerapan anggaran, khususnya belanja pegawai, operasional ataupun non operasional, serta belanja modal. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah membelanjakan sebesar Rp 1.913,9 triliun atau kurang lebih 61,6% dari total pagu. Dikutip Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 belanja barang pada bulan April mengalami penurunan

sebesar 23,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal juga mengalami tumbuh lambat jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 17,6%. Belanja modal terus menunjukkan progress yang lebih baik. Penambahan realisasi mencapai 4,13% menjadi 12,93% jika dikomparasi pada bulan Maret sebesar 8,86%. Sedangkan belanja pegawai mengalami pertumbuhan normal setiap bulan menjadi 26,15%.

Hal ini juga terjadi pada instansi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa program kegiatannya yang sudah dirancang menjadi terhambat. Hal tersebut kemudian memberikan dampak pada penyerapan anggaran yang tidak optimal. Hal ini ditunjukkan melalui besaran dari realisasi belanja tidak langsung yang cenderung lebih besar dari realisasi belanja langsungnya yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Realisasi	Anggaran Setelah	Realisasi (Rupiah)	Persentase 2020	Persentase 2019
----	-----------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------

		<b>Perubahan (Rupiah)</b>			
1	Realisasi belanja tidak langsung	8.153.644.034,50	7.318.793.212,00	89,76%	91,27%
2	Realisasi belanja langsung	17.435.771.829,00	12.915.106.246,00	74,07%	89,83%

Sumber: LKPJ Pemda Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung mencapai 89,76%, sementara realisasi belanja langsung <sup>1</sup> dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebesar 74,07%. Kondisi demikian mengindikasinya pengalokasian anggaran yang terjadi kurang efektif, karena realisasi belanja tidak langsung sendiri berkaitan dengan belanja untuk mendukung program utama yang telah direncanakan, sedangkan belanja langsung justru lebih rendah, yang menunjukkan belanja untuk menjalankan program kegiatan selama tahun 2020 belum optimal. Dilain sisi, nilai persentase belanja ditandai pada Tabel 1.1 terjadi penurunan bila dibandingkan pada tahun anggaran 2019, yang sebesar 91,27% untuk realisasi belanja tidak langsung dan 89,83% untuk realisasi belanja langsung. Hal ini menunjukkan karena pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penyerapan anggaran <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan dan pengelolaan anggaran telah banyak dilakukan, seperti penelitian dari Murdani dan Suherlan (2014) yang menjelaskan efektivitas serta efisiensi penyerapan anggaran masih kurang di bidang pendidikan

dan kesehatan dalam APBN Kabupaten Aceh Besar yang mengindikasikan terjadi kebocoran dalam penyerapan anggaran sehingga tidak optimal untuk merealisasikan program yang telah direncanakan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian berikutnya dari Prasetyo dan Nugraheni (2020) yang menjelaskan tingkat efektivitas serta efisiensi penyerapan anggaran yang bervariasi terjadi pada <sup>29</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tahun anggaran 2015 hingga 2019. Penelitian berikutnya dari Suyitno (2020) yang menjelaskan dampak Covid-19 yang menyebabkan penyerapan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjadi lebih rendah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yaitu penelitian Murdani dan Suherlan (2014) dan Prasetyo dan Nugraheni (2020) melakukan penelitian untuk menganalisa tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada instansi pemerintahan, namun tidak menjelaskan dampak dari pandemi Covid-19, karena kondisi tahun anggaran yang diteliti belum mengalami pandemi Covid-19. Pada penelitian <sup>22</sup> Suyitno (2020) meneliti mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran sebuah instansi dengan memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi.

Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu dan sumber informasi dalam mengukur kinerja penyerapan dan pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja sebuah organisasi bagi pihak yang berkepentingan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada efektivitas penyerapan anggaran yang terdapat pada <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

## <sup>19</sup> 2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini ialah.

1. Bagaimana efektivitas penyerapan anggaran di <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022 ?
2. Apakah terdapat perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di <sup>2</sup> Dinas <sup>25</sup> Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19 ?

## 2.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diajukan, maka tujuan penelitian ini ialah.

1. Menganalisis tingkat efektivitas penyerapan anggaran di <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022.
2. Menganalisis perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di <sup>7</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

## <sup>4</sup> 2.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa dijelaskan menjadi dua bentuk manfaat, yaitu.

### 1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini bisa dijadikan literatur tambahan bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai kondisi efektivitas penyerapan

anggaran, serta menganalisis efektivitas penyerapan anggaran yang terjadi sebelum pandemi dan selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2022.

## 2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini bisa memberi masukan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo khususnya, serta instansi lain secara umum untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sehingga dapat menimbulkan peningkatan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik pasca Pandemi Covid-19.

**TINJAUAN PUSTAKA****2.1.Landasan Teori****2.1.1. Akuntansi Sektor Publik**

**Akuntansi** dalam domain **publik** erat kaitannya dengan bagaimana akuntansi digunakan atau diperlakukan terhadap akuntansi sector publik. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, domain publik sendiri mengacu pada domain yang lebih besar dan rumit. Luas dari wilayah publik disebabkan oleh banyaknya jenis ataupun bentuk organisasi yang ada di dalamnya, serta rumitnya lingkungan yang berdampak pada tempat-tempat umum tersebut. (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Menurut Purba dan Silalahi (2021), Aktivitas jasa yang disebut akuntansi sektor publik mencakup pencatatan, pengelompokan, serta melaporkan setiap transaksi ekonomi untuk mendapatkan informasi keuangan yang diperlukan pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusannya mengenai pengelolaan dana publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dijelaskan akuntansi sektor publik ialah kegiatan akuntansi yang dilakukan di lingkungan pemerintahan. *American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2018) menerangkan tujuan dari akuntansi pada organisasi sektor publik ialah:

1. Memberi data yang diharapkan dapat lebih tepat, produktif serta ekonomi mengenai pengoperasian serta mengalokasikan sumber daya yang dipercayai organisasi.



2. Memungkinkan pihak manajemen guna melaporkannya kepada publik mengenai hasil operasional pemerintahan serta pemanfaatan dana publik dengan memberikan informasi yang memungkinkan manajemen melaporkan akuntabilitas atas pengelolaan program atau pemanfaatan sumber daya yang berada di bawah kewenangannya secara tepat dan efektif.

Apabila mengacu pada World Bank, penggunaan akuntansi pada sektor publik ialah guna membangun *good governance* di lingkungan pemerintahan. *Good governance* sendiri bisa dijelaskan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan serta bertanggung jawab dan sesuai pedoman demokrasi atau pasar efisien (Mardiasmo, 2018).

#### <sup>12</sup> **2.1.2. Keuangan Daerah**

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah ialah suatu bentuk kekayaan yang erat kaitannya terhadap hak dan kewajiban daerah. Hal ini mencakup hak dan kewajiban daerahnya bisa dinilai dari uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang mempunyai kewenangan atas keuangan daerah. Hal ini dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 1999 terkait Pemda, sebagai landasan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu timbulnya perbedaan antar daerah karena setiap sumber daya yang ada di sebuah daerah dikelola secara mandiri.

Khusaini (2018) menjelaskan bahwa segala kegiatannya yang menyangkut pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah perencanaan,.

Lebih lanjut Khusaini (2018) menerangkan <sup>39</sup> ruang lingkup keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah:

1. Kewenangannya memberikan pinjaman dan memungut pajaknya serta retribusi daerah.
2. Tanggung jawab daerah guna merencanakan urusan pemerintahan serta membayarkan pinjaman dari <sup>40</sup> tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah
5. Uang, piutang, surat berharga, serta kekayaan dipisahkan dari usaha daerah ialah kekayaan yang dikelola sendiri ataupun oleh pihak ketiga.
6. Kekayaan pihak lainnya dikuasai pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.

PP Nomor 58 Tahun 2005 juga menerangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari (Amin, 2019):

1. APBD yang ditetapkan tiap tahun melalui aturan daerah, mencontohkan asas terintegrasi, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukamn pada sistem yang terpadu.
2. Asas tanggung jawab, artinya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terorganisir, berdasarkan peraturan dan pedoman yang relevan, kuat, efektif, terjangkau, lugas, dapat diandalkan, adil, pantas dan berguna untuk masyarakatnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tiap daerah mempunyai kewenangan agar bisa mengurus serta mengatur keuangan daerahnya sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah ini boleh dilakukan secara berbeda-beda namun tetap memegang prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah (Khusaini, 2018):

1. Akuntabilitas, menjelaskan bahwa kebijakan harus bisa diakses, dikomunikasikan, serta bisa dipertanggungjawabkan atau pengambilan keputusan sesuai dengan amanat.
2. Keterbukaan, memahami perlunya transparansi pemerintah daerah dalam membuat strategi keuangan daerah agar dapat diperhatikan oleh daerah dan DPRD setempat.
3. Kejujuran, menyatakan pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi seharusnya bertugas mengelola keuangan publik.
4. *Value for money*, yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan daerah juga mempertimbangkan keekonomian, efisiensi, dan efektivitas.
5. Pengendalian, menyatakan bahwa pengeluaran dan penerimaan yang berasal dari keuangan daerah harus diawasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk dapat menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat. Apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik akan berdampak pada program pemerintah daerah yang berjalan secara efisien. Apabila pengelolaan keuangan tidak berdasarkan asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak negatif terhadap penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah juga dapat terkendala (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Kondisi demikian berujung pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi kurang baik.

### 2.1.3. Penyerapan Anggaran

Putra dan Dhiniharitsa (2020) menerangkan salah satu cara pengelolaan keuangan pada sebuah organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta ialah dengan membangun perencanaan dan penganggaran yang baik. Perencanaan adalah metode yang melibatkan pengalokasian aset yang terbatas pada permintaan yang tidak terbatas. Anggaran adalah hasil keluaran penganggaran. Anggaran menurut Suhendro (2021) adalah suatu rencana rinci, formal, dan kuantitatif atas perolehan dan pemanfaatan sumber daya organisasi dan pusat tanggung jawab guna melakukan kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran bisa diartikan mencakup evaluasi pelaksanaan yang akan dilakukan selama periode tertentu yang diubah menjadi struktur finansial. Anggaran juga dapat dijelaskan sebagai representasi sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan atau pengalokasian sumber daya yang dimiliki ataupun program yang direncanakan (Putra dan Dhiniharitsa, 2020).

Prasetyo dan Nugraheni (2020) menerangkan anggaran sebagai *managerial plan for action*, artinya anggaran bermanfaat guna memfasilitasi tercapainya tujuan sebuah organisasi. Anggaran yang terdiri atas transfer, rencana pendapatan, belanja, serta biaya yang dihitung dalam satuan rupiah dan dikategorikan secara spesifik dan sistematis pada jangka waktu tertentu, diuraikan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman tindakan pemerintah. (Paat, Nangoi, dan Pusung, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat perencanaan atau alat pengendalian pemerintah daerah.

Sebagai alat perencanaannya, anggaran bisa digunakan untuk menrencanakan kegiatan pusat pertanggungjawaban, agar dalam melakukan kegiatannya berdasarkan jalur yang sudah ditentukan. Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat dilakukan sebagai tolok ukur kinerja pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pada tahap persiapan dan perencanaan anggaran, estimasi untuk pendapatan dan pengeluaran cenderung jarang akurat. Hal ini dikarenakan pada proses penyusunan anggaran terdapat dorongan yang timbul dari manajerial yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan pernyataan pendapatan *underestimate* dan pengeluaran *overestimate* yang menimbulkan perilaku menyimpang dari para manajer (Otley, 1985).

Anggaran juga dapat berdampak pada kinerja pemerintahan berkaitan dengan fungsi pemerintahan dalam memberi layanan kepada masyarakatnya. Menurut Busch (2002), organisasi sektor publik ialah organisasi yang rumit, maka konsep yang bisa dipakai untuk menilai teknik yang mengarah pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas adalah berdasarkan konsep *budgetary slack*. Busch (2002) menerangkan, apabila bawahan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran menimbulkan perilaku disfungsional oleh para atasan.

Bawahan cenderung menganggarkan lebih banyak ketika menyusun anggaran pengeluaran dan lebih sedikit ketika menyusun anggaran pendapatan berdasarkan asumsi bahwa anggaran tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kinerja bawahan. Dengan demikian tingkat partisipasi yang tinggi dari para manajer

dalam menyusun anggaran akan memberikan kesempatan untuk menciptakan *budgetary slack* (Young, 1985). *Budgetary slack* secara pengertian adalah bentuk perilaku menyimpang untuk dapat menikkan biaya ataupun menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, dengan tujuan anggaran lebih mudah dicapai (Ardianti, Suardikha, dan Suputra, 2015).

Pada Tahun 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan <sup>11</sup> Nomor S-837/MK.05/2019 mengenai langkah strategik dalam melaksanakan anggaran tahun 2020. Hal ini kemudian diteruskan Direktur Jenderal Perbendaharaan berupa aturan dengan menjelaskan indikator dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja disebuah instansi. Ketentuan yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan anggaran per tahun 2020 adalah (Suyitno, 2020).

1. Berdasarkan perbandingan antara target penyerapan anggaran triwulanan dengan persentase penyerapan anggaran DIPA PAGU.
2. Secara proporsional Target penyerapan anggaran KL pada triwulan I sampai dengan IV masing-masing sebesar 15%, 40%, 60%, dan 90%.
3. Nilai kinerja maksimal 100 diberikan kepada Satuan Kerja, Eselon I, Kementerian, dan Lembaga yang realisasi penyerapannya lebih tinggi dari target penyerapan triwulanan.

#### **2.1.4. Prosedur Alokasi Dana APBD**

APBD ialah perencanaan keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah disepakati DPRD. Tahun anggaran APBD mencakup masa setahun, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan APBD harus didasarkankan pada prinsip berikut:

1. Persyaratan pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan APBD.
2. Penyusunan APBD harus sesuai tahap atau jadwal, dan tepat waktu.
3. Perencanaan APBD dilakukan secara lugas sehingga mempermudah masyarakat luas untuk mengetahui dan mengakses data yang berkaitan dengan APBD.
4. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.
5. Pengertian benar dan salah harus menjadi pertimbangan APBD.
6. Substansi APBD dilarang melanggar kepentingan umum, pedoman yang lebih tinggi, dserta pedoman kewilayahan lainnya.

Subtansi KUA terdiri dari sesuatu berupa kebijakan umum serta tidak menerangkan sesuatu yang berupa teknis. Adapun kebijakan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gambaran keadaan industri keuangan makro, termasuk perubahan indikator makroekonomi regional.
2. Tingkat inflasi, pertumbuhan PDRB, serta asumsi mengenai keadaan keuangan daerah lainnya digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD tahun sebelumnya.
3. Strategi pembayaran daerah yang menandakan perkiraan rencana sumber atau ukuran pembayaran daerah untuk rencana pengeluaran jangka waktu berikutnya dan prosedur untuk mencapainya.
4. Pendekatan penggunaan di tingkat provinsi mencerminkan proyek dan langkah-langkah strategi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan

perbaikan lokal yang merupakan indikasi sinkronisasi strategi antara negara-negara teritorial dan fokus serta prosedur untuk mencapainya.

5. Susunan pendukung yang menggambarkan sisi kekurangan dan kelebihan APBD dengan mengharapkan sepenuhnya kondisi pendanaan provinsi untuk menjawab permintaan kemajuan wilayah dan sistem untuk mencapainya.

### **2.1.5. Laporan Realisasi Anggaran**

Organisasi pemerintahan memiliki tuntutan untuk dapat membuat laporan yang menggambarkan kondisi keuangan yang tujukan pada pihak eksternal, yaitu DPR, BPK, masyarakat, dan pihak eksternal yang berkepentingan lainnya. Bentuk laporan keuangan organisasi pemerintahan salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Prasetyo dan Nugraheni (2020), Sebuah lembaga pemerintah menghasilkan laporan yang dikenal sebagai laporan realisasi anggaran yang mencakup data pengeluaran, pembiayaan, dan pendapatan yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu. Menurut Renaldi (2021), mengatakan laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan diantara anggaran serta apa yang dilakukan pada 1 periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran yaitu memberi laporan yang sebanding mengenai realisasi sert anggaran entitas pelapor.

Sejauh mana tercapainya tujuan yang ditentukan legislatif dan eksekutif berdasarkan aturan undang-undang ditandai dengan perbandingan diantara anggaran dengan hasil yang sebenarnya. Kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menandakan kepatuhan terhadap APBD tercermin dalam laporan ini sendiri.



Laporan realisasi anggaran, Menurut Basri (2013), disajikan sedemikian rupa maka bisa memberi informasi mengenai transfer, pendapatan, surplus atau defisit, belanja, serta pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran mencakup: 1) pendapatan; 2) belanja; 3) transfer; (4) surplus dan defisit; 5) menerima pendanaan; (6) mengeluarkan biaya; (7) pendanaan bersih; 8) kelebihan atau kekurangan membiayai anggaran.

#### **2.1.6. Efektivitas Anggaran Belanja**

Tujuan analisis efektivitas adalah untuk memastikan apakah penggunaan dana suatu anggaran sudah mencapai tingkat efisien atau belum. Hal ini dilakukan dengan mengkaji masing-masing program yang menggunakan anggaran dari APBD, sesuai skala kebutuhan dan mempunyai kepentingan bagi keberlangsungan kegiatan daerah. Putra dan Dhiniharitsa (2020) memahami bahwa salah satu penanda untuk memperkirakan keberhasilan suatu program adalah dengan memikirkan kelayakannya.

Sebuah organisasi dapat dinyatakan memiliki efektivitas yang baik apabila program ataupun kegiatan yang telah direncanakan bisa direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas ini menjelaskan setiap program yang telah direncanakan dapat dijalankan sepenuhnya tanpa menilai besarnya uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Efektivitas menjadi perhal penting dalam organisasi pemerintahan karena dapat digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya.

Apabila penyerapan anggaran ditahun sebelumnya tidak efisien, maka besar kecenderungan di periode selanjutnya anggaran akan dikurangi.

Membandingkan anggaran belanja dengan anggaran belanja sebenarnya kemudian mengalikannya 100 persen adalah cara mengukur efektivitas. Rumus yang digunakan dapat ditunjukkan sebagai berikut (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ belanja}{Anggaran\ belanja} \times 100\%$$

Suyitno (2020) menjelaskan 5 kriteria tingkat efektivitas yang dijelaskan yaitu.

1. Apabila persentase menunjukkan nilai  $> 100\%$ , maka dapat dijelaskan penyerapan kategori melebihi baik.
2. Apabila persentase menunjukkan nilai  $90\% - 100\%$ , maka dapat dijelaskan penyerapan kategori baik.
3. Apabila persentase menunjukkan nilai  $80\% - 90\%$ , maka dapat dijelaskan penyerapan kategori cukup baik.
4. Apabila persentase menunjukkan nilai  $60\% - 80\%$ , maka dapat dijelaskan penyerapan kategori kurang baik.
5. Apabila persentase menunjukkan nilai  $< 60\%$ , maka dapat dijelaskan penyerapan kategori belum baik.

#### 2.1.7. <sup>69</sup> Peraturan Daerah tentang RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2021 mengenai RPJMD Tahun 2021 - 2026. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo ialah RPJMD. Jangka waktunya 5 tahun terhitung sejak Kepala Daerah menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatannya. RPJMD Pemerintahan

Sidoarjo ialah catatan penyusunan jangka menengah lima tahunan bagi Pemerintahan Sidoarjo. Maksudnya adalah mengarahkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengatur pemerintahan, mengawasi kemajuan serta memberikan bantuan kepada daerah. Visi, strategi, arah kebijakan, program, tujuan, pembangunan daerah, sasaran serta keuangan daerah Kepala Daerah semuanya berperan dalam penyusunan RPJMD ini. Program untuk perangkat daerah dan lintas daerah juga disertakan, begitu pula rencana pendanaan indikatif lima tahunan yang mempertimbangkan <sup>17</sup> RPJMD Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis Perangkat Daerah serta penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD, yang juga berfungsi sebagai alat dokumen penganggaran dan penilaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD disebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan <sup>52</sup> Pasal 264 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai <sup>3</sup> Pemda. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memerlukan <sup>3</sup> pembentukan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Pembangunan lima tahun keempat tahun 2021-2026 perlu fokus pada sasaran Utamanya RPJPD periode 5 tahun keempat 2021-2024 dalam upaya menjamin konsistensi diantara jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) dokumen perencanaan. Periode keempat adalah masa pencapaian Visi Perbaikan Berkelanjutan, yaitu Pemerintahan Sidoarjo yang Otonom, Sejahtera, dan Madani.

<sup>3</sup> Mengidentifikasi Visi, Misi serta Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai Visi, Misi, serta <sup>3</sup> Program Prioritas Kabupaten Sidoarjo yang dipilih adalah bagaimana hubungan diantara <sup>3</sup> RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilaksanakan. Visi, Misi dan Strategi Pimpinan Legislatif Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah t:

<sup>6</sup> Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

Sementara Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan ialah:

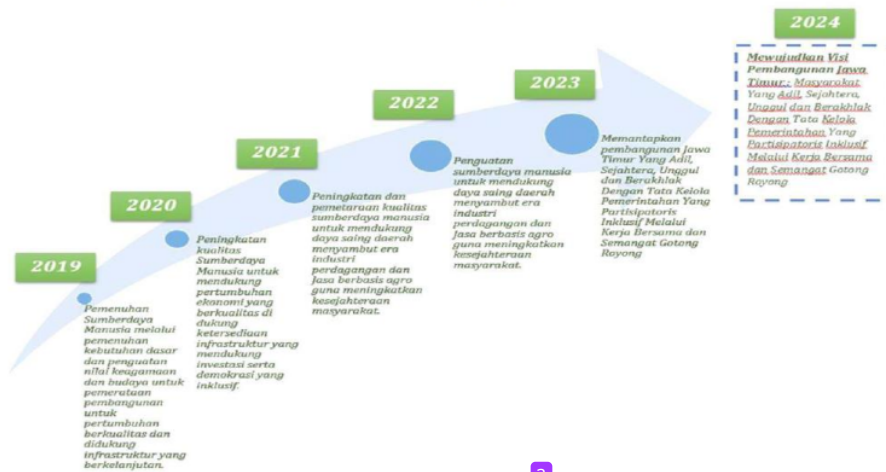
1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, Wilayah atau Sektor.
2. Menciptakan Kesejahteraan dengan Keadilan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Khususnya Pendidikan dan Kesehatan, menciptakan <sup>3</sup> lapangan kerja dengan Berfokus pada kelompok rentan.
3. Tata Kelolaan Pemerintah yang bersih, inventif, transparansi, dan partisipatif memperkuat demokrasi warga guna memberikan <sup>3</sup> ruang sosial yang menjunjung prinsip Kebhinekaan.
4. Melakukan Pembangunan dengan Begotong Royong dan berwawasan lingkungan guna memastikan keselarasan ruang ekologi, sosial, ekonomi, serta budaya.

Berikut strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024:



Gambar 2.1 Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Menyinggung Visi, Misi serta Prosedur Peningkatan di atas, maka Sasaran Strategi Kemajuan Jawa Timur Tahun 2019-2024 disajikan dalam gambaran berikut:



Gambar 2.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Peta orientasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat diperoleh dengan meninjau <sup>3</sup> Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Ada berbagai penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Suyitno (2020)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan dampak dari penyebaran virus Covid-19 terhadap penyerapan anggaran yang diukur melalui efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Penelitian ini dilakukan terhadap <sup>11</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penyerapan anggaran APBN. Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan penyebaran virus Covid-19 memberi dampak dalam <sup>49</sup> penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dampak negatifnya berupa nilai kepatuhan terhadap target penyerapan anggaran yang lebih rendah yaitu sebesar 22,59% dari yang seharusnya 40%. Kinerja penyerapan anggaran juga belum baik yang sebesar 46,84% di 2019 dan 56,48 di 2020, keduanya masih dibawah 60% atau belum baik. Dampak positifnya adalah mengalami penghematan anggaran dan efisiensi dalam menggunakan anggaran.

Penelitian Suyitno (2020) mempunyai persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitiannya ialah menjelaskan efektivitas serta dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran. Perbedaannya adalah instansi yang diteliti, pada penelitian Suyitno (2020) dilakukan terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di **Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo**.

2. Murdani dan Suherlan (2014)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta **efisiensi penyerapan anggaran** di bidang **pendidikan** ataupun **kesehatan** dalam APBN Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif kuantitatif dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitiannya menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran bidang pendidikan dalam APBN Kabupaten Aceh Besar masih kurang efektif dan kurang efisien. Terjadi banyak kebocoran dalam penyerapan anggaran dan anggaran belum digunakan untuk merealisasikan program yang telah direncanakan secara maksimal sehingga masyarakat juga belum dapat merasakan program yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan Murdani dan Suherlan (2014) mempunyai persamaan dengan penelitian sekarang dilakukan, yaitu menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Murdani dan Suherlan (2014) dilakukan dalam rangka penyerapan APBN Kabupaten Aceh

Besar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

3. Putra dan Dhiniharitsa (2020)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan teknik analisis berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman berada di angka 80% atau cukup efektif, yang berarti realisasi anggaran dengan target anggaran sepenuhnya belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat program yang belum berjalan. Pada tingkat efisiensi penyerapan anggaran menunjukan nilai yang tergolong kategori efisien dan sangat efisien. Hasil ini menjelaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman mendahulukan program inti sebagai tujuan utamanya dari organisasi maka penyerapan anggarannya menjadi tepat sasaran dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Penelitian Putra dan Dhiniharitsa (2020) mempunyai persamaan yaitu sama menjelaskan tingkat efektivitas dari penyerapan anggaran. Perbedaannya adalah penelitian Putra dan Dhiniharitsa (2020) melakukan penelitian terhadap instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.



4. Prasetyo dan Nugraheni (2020)

Penelitian bertujuan guna mengetahui tingkat <sup>8</sup>efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam kurun periode 2015 hingga 2019. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian menjelaskan 2018 dan 2019 penyerapan anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, namun pada tahun 2017 penyerapan anggaran kurang efektif dan tahun 2015 hingga 2016 penyerapan anggaran cukup efektif. Pada tingkat efisien, penyerapan anggaran dari tahun 2015 hingga 2019 tidak menunjukkan efisiensi yang baik. Sehingga jumlah anggaran untuk <sup>29</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang semakin tahun semakin berkurang.

Penelitian Prasetyo dan Nugraheni (2020) mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Prasetyo dan Nugraheni (2020) menjelaskan <sup>8</sup>penyerapan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan terhadap <sup>2</sup>Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

5. Paat et al. (2019)

Penelitian bertujuan untuk menganalisa efektivitas serta efisiensi <sup>14</sup>anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon periode 2015-2017. Teknik analisis yang dilakukan

deskriptif kuantitatif dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menandakan rasio efektivitas pengelolaan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sebesar 93,44% yang termasuk kategori efektif terus turun hingga pada tahun 2017 menjadi 85,68% yang tergolong cukup efektif. Pada efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menunjukkan nilai persentase yang termasuk sangat efisien, yaitu bisa meminimalkan pemborosan ataupun mengoptimalkan penggunaan dananya.

Penelitian Paat et al. (2019) mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama menjelaskan efektivitas pengelolaan anggaran. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, penelitian Paat et al. (2019) dilakukan terhadap <sup>10</sup>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, penelitian yang <sup>1</sup>sekarang dilakukan terhadap Dinas <sup>1</sup>Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

6. Amaral dan Wiagustini (2019)

Penelitian bertujuan menganalisis <sup>26</sup>efektivitas penyerapan anggaran belanja pada *Ministerio das Obras Publicas*, yang merupakan salah satu instansi di Timor Leste pada periode 2009 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitiannya menandakan rasio efektivitas anggaran tahun 2009 hingga 2013 sebesar 89,29% yang termasuk cukup efektif. Hal ini menandakan kinerja pengelolaan anggaran yang dilakukan <sup>26</sup>*Ministerio das Obras Publicas* cukup baik dari tahun 2009 hingga 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Amaral dan Wiagustini (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama menjelaskan terkait dengan efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Amaral dan Wiagustini (2019) tempat penelitian, dimana *Ministerio das Obras Publicas* untuk penelitian Amaral dan Wiagustini (2019) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk penelitian yang sekarang dilakukan.

7. Fahlevi dan Ananta (2015)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung di SKPD Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis dekriptif kuantitatif dengan berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitiannya menandakan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung SKPD Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga tahun 2013 bervariasi. Faktor yang dominan menentukan efisiensi anggaran adalah pada perencanaan anggaran, secara khusus terdapat perbedaan antara rencana keuangan yang diusulkan dan didukung, kesulitan dalam menentukan perkiraan biaya, dan menyusun upaya yang tidak mengatasi masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi dan Ananta (2015) menunjukkan persamaan, yaitu sama menganalisis efektivitas anggaran belanja. Perbedaannya adalah penelitian Fahlevi dan Ananta (2015) juga menerangkan faktor yang menentukan efisiensi dan efektivitas, sedangkan

penelitian yang sekarang menerangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran.

8. Purba dan Silalahi (2021)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan BPKPAD Kota Tebing Tinggi selama periode 2015 hingga 2019. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dengan berdasarkan rasio <sup>31</sup> efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas yang ditunjukkan selama tahun 2015 hingga tahun 2019 secara berurutan 94,66%, 94,11%, 94,49%, dan 90,47% yang tergolong efektif. Perbedaan nilai terjadi dikarenakan terdapat program yang tidak terlaksana namun telah dianggarkan. Pada tingkat efisiensi selama tahun 2015 hingga 2019 tergolong efisiensi.

Penelitian Purba dan Silalahi (2021) mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama menganalisis efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya pada penelitian Purba dan Silalahi (2021) dilakukan terhadap BPKPAD Kota Tebing Tinggi, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan <sup>7</sup> di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

9. Suriatman dan Syamsul (2021)

Penelitian bertujuan menilai tingkat <sup>54</sup> efektivitas dan efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan data anggaran tahun 2015 hingga 2019 yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan rata-rata tingkat efektivitas belanja daerah adalah lebih dari 90%

yang termasuk kriteria efektif. Pada tingkat efisiensi belanja rata-rata adalah lebih dari 60% yang termasuk sangat efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriatman dan Syamsul (2021) memiliki persamaan yaitu sama menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada sebuah instansi. Perbedaannya penelitian Suriatman dan Syamsul (2021) menganalisis pada instansi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian yang sekarang melakukan di <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

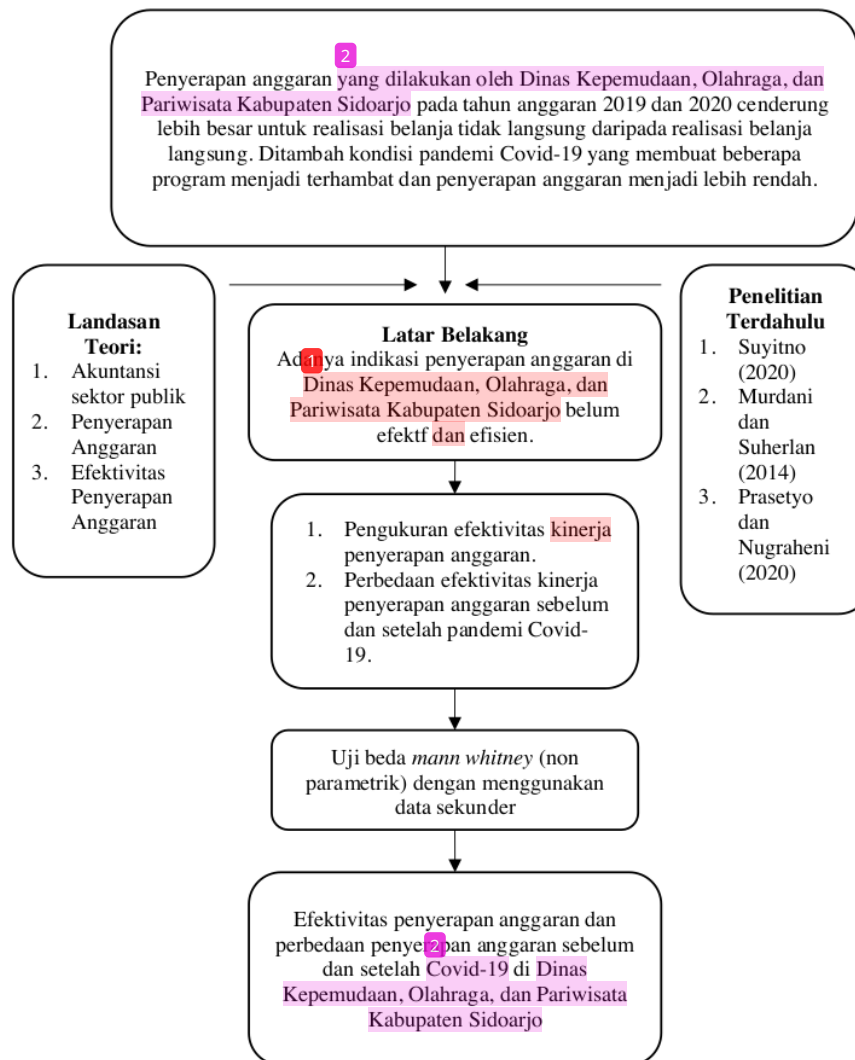
### 2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari adanya pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Analisis yang dilakukan berdasarkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran <sup>2</sup> oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Pada anggaran tahun 2019 dan 2020, <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penyerapan anggaran yang dominan pada realisasi belanja tidak langsung daripada realisasi belanja langsung. Selain itu, nilai persentase realisasi anggaran belanja juga mengalami penurunan di tahun 2020. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran <sup>27</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo cenderung belum optimal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut tingkat efektivitas penyerapan anggaran Kabupaten

Sidoarjo selama masa pandemi Covid-19 dan menganalisa dampak pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4. Hipotesis Penelitian

### 2.1.1. Terdapat Perbedaan Efektivitas Penyerapan Anggaran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Efektivitas menandakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program berdasarkan yang sudah direncanakan. Efektivitas yang semakin tinggi menunjukkan organisasi dapat mengelola sumber dana yang tersedia untuk diwujudkan guna kepentingan organisasi. Setiap program atau kebutuhan dari organisasi dapat terpenuhi secara penuh oleh anggaran yang disediakan, hal menunjukkan organisasi mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran dengan baik (Putra dan Dhiniharitsa, 2020). Menurut Murdani dan Suherlan (2014), efektivitas menunjukkan penyerapan anggaran dapat mengakomodasi setiap program yang direncanakan secara maksimal sehingga outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya berdasarkan pada besarnya nominal anggaran yang diserap. Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kepatuhan target penyerapan anggaran (Suyitno, 2020). Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan berikutnya ialah:

H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan efektivitas penyerapan anggaran sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1. Pendekatan Penelitian**

Tujuan penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah guna mengetahui nilai variabel-variabel independen tanpa membandingkannya atau menjelaskan keterkaitannya satu sama lain. (Sugiyono, 2012). Pengukuran yang dapat menghasilkan suatu angka baik dalam bentuk rasio maupun dalam bentuk lainnya digunakan dalam strategi penelitian kuantitatif ini. (Muchson, 2017). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatannya kuantitatif yaitu bermaksud menganalisis perbedaan efektivitas penyerapan anggaran yang terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum atau setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2022.

#### **2.2. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel**

##### **2.1.1. Populasi**

Populasi menurut Chandrarin (2017) ialah wilayah spekulasi yang mencakup obyek ataupun subyek yang mempunyai karakteristik yang ditentukan peneliti untuk diteliti lalu ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, populasi penelitian adalah segala bentuk obyek dengan karakteristiknya. Populasi penelitian ini adalah semua program kerja dan kegiatan yang menggunakan anggaran dan dipublikasikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi



Pemerintahan (LAKIP) <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

### 2.1.2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ialah sekumpulan obyek atau subyek ialah bagian dari populasi (Chandrarin, 2017). Penentuan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu semua anggota populasinya menjadi sampel penelitian. Untuk mencapai strategi dan arah kebijakan RPJMD melakukan 15 program dan kegiatan yang telah dipublikasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) dengan rincian yang dapat diperhatikan melalui <sup>56</sup> Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Sampel Penelitian**

Tahun	Program Kegiatan
2019	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	2. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	3. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2020	4. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	5. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	6. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2021	7. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	8. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	9. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2022	10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing

Tahun	Program Kegiatan
	Keolahragaan
	12. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	14. Program Pemasaran Pariwisata
	15. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 - 2022

## 2.3. Variabel Penelitian

### 2.1.1. Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang dipakai meliputi 2 variabel. Variabel independen yaitu pandemi Covid-19, kemudian variabel dependen yaitu efektivitas penyerapan anggaran.

### 2.1.2. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi dari tiap variabel penelitian yang diteliti bisa dijelaskan, yakni.

#### 1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjelaskan periode sebelum pandemi serta selama pandemi. Pada penelitian ini, sebelum pandemi Covid-19 adalah periode 2019, sedangkan selama pandemi Covid-19 adalah periode 2020 hingga 2022.

#### 2. Efektivitas Penyerapan Anggaran

Efektivitas penyerapan anggaran menjelaskan pencapaian untuk memanfaatkan anggaran seminimal mungkin untuk menjalankan program kerja secara optimal. Ukuran efektivitas penyerapan anggaran pada penelitian ini menggunakan rumus berikut (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ belanja}{Anggaran\ belanja} \times 100\%$$

#### 2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Data didapat dari laporan yang dipublikasikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Laporan yang dimaksud ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) baik secara tahunan. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah data yang lebih besar mengenai aktivitas belanja yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada tahun tahun 2019 hingga tahun 2022.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

##### 2.1.1. Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat kenormalan data didalam variabel penelitian. Uji normalitas ialah bagian dari uji asumsi klasik ialah pengujian yang dilakukan dengan maksud memeriksa *error* serta memastikan kelayakan dari model yang diuji. Uji normalitas dikatakan normal jikanilai signifikan lebih besar dari 0,05 dengan melakukan uji *Saphiro Wilk*.

##### 2.1.2. Uji Asumsi Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan guna menjelaskan keragaman data yang digunakan (Ismail, 2018). Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan *Levene's Test of Homogeneity of Variance* dengan ketentuan yang digunakan adalah varians kelompok data yang dibandingkan sama, apabila angka probabilitasnya harus diatas 0,05 atau nilai kritis 5%.

### 2.1.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini yakni membandingkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran sebelum dan selama pandemi Covid-19. Perbandingan ini dilakukan dengan uji t yakni menggunakan *independent sample t test*, tetapi apabila data tidak terdistribusi dengan normal uji t dilakukan statistik non parametrik menggunakan *Mann Whitney test*. Tujuan dari uji t ialah guna mengetahui perbedaan rata-ratana secara nyata.

Pengambilan keputusan dari uji t ialah:

1. Jika statistik hitung > statistik tabel, maka  $H_0$  ditolak
2. Jika statistik hitung < statistik tabel, maka  $H_0$  diterima

Uji statistik tersebut dihitung dengan rumus  $t = \frac{D}{sd/\sqrt{n}}$ , sd dirumuskan :

$$s = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n - 1}}$$

Keterangan:

- t : Nilai distribusi t
- D : Rata-rata perbedaaan antara pengamatan
- Sd : Standar Deviasi dari perbedaan pengamatan

n : Jumlah pengamatan

d : Perbedaan antara data

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

## 4.1.1 Identitas Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

## Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo ialah perangkat kewilayahan yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Pedoman Kewilayahan tersebut, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata serta bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah provinsi.

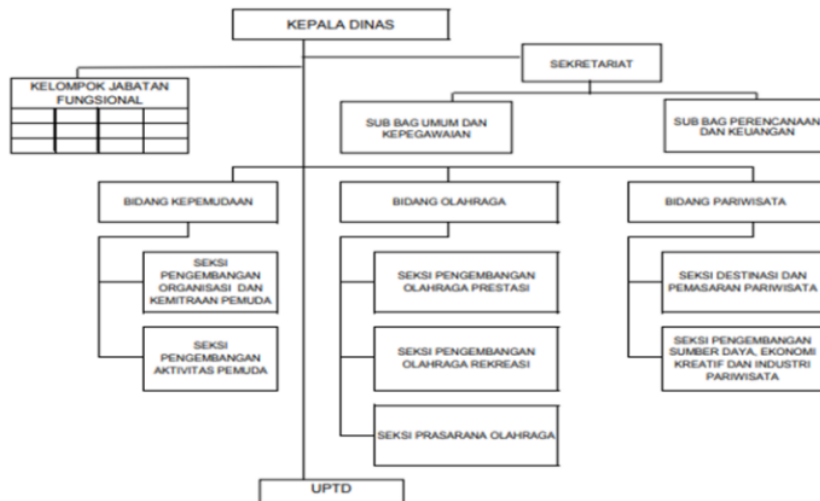
Peraturan Bupati Sidoarjo No.19 Tahun 2022 menguraikan kedudukan, tatanan organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan daerah sebelumnya. Dalam pengaturan tersebut disebutkan bahwa Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, melaksanakan unsur-unsur: (1) Kepemudaan; 2) Olahraga; (3) Pariwisata.

## 4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

## Kabupaten Sidoarjo

Telah dibuat struktur organisasi agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Perjalanan Wisata Pemerintahan Sidoarjo digerakkan oleh kepala dinas dibantu Sekretariat dan bidang khusus. Berikut susunan organisasinya :



20

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan pada struktur organisasi di Gambar 2.1, maka rincian tugas pokok dan fungsi struktural untuk setiap posisi yaitu.

1. Kepala Dinas, bertugas memimpin, mengawasi, serta mengevaluasi kegiatan Pelayanan serta menyelenggarakannya. Tanggung jawab Kepala Dinas meliputi hal-hal berikut:
  - a. Penyusunan program di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata serta kesekretariatan.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab resmi.
  - c. Mengawasi serta mengevaluasi bagaimana tugas resmi dilaksanakan.
  - d. Memberikan arahan bagi pelaksana tugas bawahannya.
  - e. Mengungkapkan pelaksanaan kewajiban kepada bupati.

- f. Menyelesaikan segala tanggung jawab lain yang diberikan Bupati kepadanya sesuai tanggung jawabnya.
2. Tugas perencanaan, pelaporan, personalia, serta keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat. melayani tujuan:
    - a. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan perencanaan program.
    - b. Pelayanan kepegawaian dan administrasi umum.
    - c. Mengelola administrasi keuangan.
    - d. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Pelayanan kepada saya sesuai dengan tanggung jawab saya.
  3. Bidang Kepemudaan, bertugas melakukan tugas Dinasnya dalam bidang kepemudaan. Bidang Kepemudaan berfungsi:
    - a. Menyusun strategi teknis untuk pemuda
    - b. Melakukan tindakan kepemudaan.
    - c. Melaporkan bagaimana aktivitas kepemudaan.
    - d. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberi kepala dinas kepadanya sesuai tanggung jawabnya.
  4. Bidang Olahraga, bertugas melakukan beberapa kewajiban wewenang di bidang olahraga. Fungsi bidang olahraga yaitu :
    - a. Kesiapan strategi khusus olahraga.
    - b. Partisipasi dalam acara olahraga.
    - c. Meliputi pelaksanaan latihan olahraga.
    - d. Melakukan berbagai tugas yang ditunjuk kepala dnas sesuai kewajibannya.



5. Sektor Pariwisata bertanggung jawab melaksanakan sebagian tanggung jawab resmi sektor pariwisata. Fungsi bidang pariwisata:
  - a. Membuat kebijakan teknis khusus pariwisata
  - b. Kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dilakukan.
  - c. Melaporkan bagaimana aktivitas pariwisata dilakukan.
  - d. Menyelesaikan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas kepadanya sesuai tanggung jawabnya.
6. Unit Pelaksana Teknis, ialah komponen pelaksanaan teknis dinas, yang bertugas menyelesaikan <sup>1</sup> sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang sifatnya fungsional atau berpotensi memberikan bantuan khusus tertentu. Unit Pelaksana teknis merupakan bawahan dan cakap yang dipimpin oleh seorang Kepala kepada Kepala Dinas serta pengarahannya khusus diselesaikan Kepala Bidang berdasarkan bidang keahliannya.
- <sup>1</sup> 7. Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas untuk menyelesaikan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai keahliannya.

#### 4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Perincian sistem memahami strategi pelaksanaan dan juga tahapan bagaimana target pembangunan dicapai dengan mempertimbangkan unsur-unsur keadaan internal dan eksternal daerah. Sementara arah kebijakannya menyatakan timeline pelaksanaan strategi yang ditetapkan untuk periode RPJMD lima tahun. Memutuskan arah Strategi yang tepat seharusnya menentukan tema pembangunan Tahunan dalam RKPD. Dengan demikian, teknik yang ditetapkan dalam berbagai arah strategi dan proyek perbaikan yang tepat dapat memberikan makna keterkaitan

yang konsisten antara komitmen setiap hal terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Berikutnya membahas mengenai <sup>1</sup> arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

#### A. Strategi Pembangunan

Terdapat strategi umum dan strategi berdasarkan tujuannya ataupun sasarannya dalam Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sampai dengan 2026. Strategi Umum sebagai landasan fungsional dan penentu strategi tahunan menuju struktur kemajuan <sup>1</sup> jangka menengah untuk upaya memahami Visi dan Misi Bupati. Melalui cara ini, arah kebijakannya ialah gambaran teknis dari sasaran pembangunan tahunan. Sementara itu, Metodologi dengan Tujuan dan Sasaran tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan program dalam mendukung ketercapainya tujuan Penyempurnaan RPJMD. Oleh karena itu, Strategi tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD ialah salah satu komponen Strategi Umum yang fungsinya memberi pedoman serta arahan yang lebih spesifik. Perumusan strategi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Strategi Umum

Secara garis besar, strategi pembangunan ialah suatu teknik/pendekatan/strategi/tahap yang secara umum dianggap cocok untuk dilakukan sehingga program yang diselesaikan tepat guna serta menjamin terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Menyinggung Permendagri No.86 Tahun 2017 Untuk periode RPJMD lima tahun, penyusunan strategi pembangunan selanjutnya menjadi landasan arah

kebijakan pembangunan tahunan. Oleh karena itu, memerlukan penyusunan Strategi Umum untuk menghasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan. Strategi ini menggambarkan cara, pendekatan, kebijakan, dan tahapan yang dianggap sesuai dalam melaksanakan program dan kegiatan guna <sup>1</sup>menjamin tercapainya Visi dan Misi Bupati.

**Strategi umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo** mencakup 5 fokus sebagai rangkuman jiwa Visi dan Misi perbaikan jangka menengah. 5 strategi umum seperti yang diperkenalkan pada gambar di bawah:

- a. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
- b. Penguatan perekonomian daerah yang penting sejalan dengan percepatan perekonomian masyarakat.
- c. Penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dan pembangunan wilayah dalam mendukung infrastruktur perencanaan kota yang terpadu.
- d. Kemajuan yang berfokus pada manusia.
- e. Semangat pertumbuhan nilai-nilai agama dan budaya.

## <sup>1</sup>2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

**Kabupaten Sidoarjo** merencanakan suatu Teknik dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran, yaitu strategi/pendekatan/strategi/tahapan yang dianggap secara umum cocok untuk dilaksanakan sehingga program yang dilakukan bisa tepat serta menjamin tercapainya Tujuan dan Fokus dari RPJMD. <sup>1</sup>Strategi

Berdasarkan Tujuan dan Sasarannya mempunyai cakupan tingkat Perangkat Daerah (PD), sedangkan Strategi Umum mempunyai cakupan tingkat daerah. Selain itu, Sasaran dan Sasaran Strategi didasarkan pada Strategi Umum ini. Sementara itu, tabel berikut memberikan gambaran menyeluruh mengenai rumusan Strategi berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan</b>		
<b>Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.</b>		
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan	Sasaran 1.1 : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Usaha Mikro,	Strategi 1.1.1. Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan</b>		
<b>Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.</b>		
Perdagangan serta mendorong potensi 250ocal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan	Koperasi, Pertanian dan Perikanan.	jasa.
		Strategi 1.1.2. Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi.
		Strategi 1.1.2. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
Tujuan 2: Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Sasaran 2.1: Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.	Strategi 2.1.1. Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
		Strategi 2.1.2. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.
<b>MISI 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses</b>		
Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi 250ocal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Sasaran 1.1: Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.	Strategi 1.1.1. Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa.
		Strategi 1.1.2. Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi.
		Strategi 1.1.2. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
Tujuan 2: Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Sasaran 2.1: Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.	Strategi 2.1.1. Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
		Strategi 2.1.2. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.

Strategi dan Arah Pendekatan ini memahami pilihan kegiatan/strategi untuk membantu melakukan program dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## B. Arah Kebijakan

Landasan utama dalam menetapkan atau melaksanakan Arah Kebijakan pada tiap misi pembangunan <sup>1</sup> Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah strategi pembangunan periode 2021 sampai dengan tahun 2026 tersebut di atas.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Umum RPJMD

Arahan Kebijakan Umum tersebut, sebagai wujud dari Strategi Umum, bisa menjadi Milestone pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2021 hingga tahun 2026. Pencapaian-pencapaian yang terlepas dari Arahan Strategis tersebut dapat dijadikan sebagai semacam perspektif untuk fase-fase progresif yang signifikan setiap tahunnya. persiapan di tingkat provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah. Arah kebijakan sebelumnya sejalan <sup>1</sup> dengan tema pembangunan nasional dan provinsi tahunan Jawa Timur pada tahap implementasi.

kaitannya dengan tujuan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata saat ini, yaitu:

1. Memanfaatkan indikasi jumlah pemuda berprestasi atau kreatif regional, nasional, serta internasional untuk meningkatkan peran atau pemuda berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Meningkatkan jumlah prestasi olahraganya ditingkat regional, nasional serta internasional melalui penggunaan indikator jumlah prestasi olahraga dan tingkat kepuasan pengunjung fasilitas olahraga.
3. Melalui indikasi jumlah industrinya dan <sup>1</sup> usaha kreatif penunjang sektor pariwisata, jumlah destinasi serta objek wisata, serta rata-rata lamanya tinggal, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan internasional.

Maka upaya-upaya berikut dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui arah strategi dan kebijakan:

- <sup>1</sup> 1. Di bidang Kepemudaan ialah :
  - a. Memberdayakan pelatihan berbasis IT yang lebih kontemporer;
  - b. Melalui acara yang diselenggarakan sesuai dengan tema yang diikuti, kegiatan pencarian pemuda berbakat;
  - c. Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi sebagai bentuk penghormatan serta menarik perkembangan pemuda berprestasi lainnya;
  - d. Memberikan jabatan dan landasan bagi kemajuan pemuda;

- e. Tumbuhnya organisasi Kepanduan untuk mengangkat isu-isu pemuda secara keseluruhan.

## 2. Di Bidang Olah Raga

- a. Meningkatkan jumlah acara olahraga lokal guna mengasah atau mengembangkan keterampilan atlet;
- b. Gunakan acara terorganisir untuk menemukan atlet potensial yang berbakat;
- c. Pemberian santunan kepada pelaku olahraga kepada pemerintah yang telah diberikannya kepada daerah;
- d. Memperluas kelas persiapan/olahraga yang telah dilakukan;
- e. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas olahraga yang ada, diperlukan juga strategi dan arah kebijakan. Contohnya seperti pemantauan dan evaluasi bangunan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, penyusunan grand design revitalisasi fasilitas olahraga yang sudah ada, dan perencanaan memelihara sarana dan prasarana olahraga.

## 3. Di Bidang Pariwisata

- a. Memantau layanan di tempat wisata;
- b. Menyeleksi acara-acara baik lokal ataupun publik: dengan acara-acara yang lebih meriah serta dipesan serta mengadakan acara-acara di tempat-tempat liburan terkenal di daerah tersebut;



- c. Gunakan peta wisata, pamflet, buku pegangan, dan materi promosi lainnya;
- d. memberdayakan duta pariwisata untuk memberikan informasi wisata kepada pengunjung di Kabupaten Sidoarjo;
- e. memanfaatkan media sosial.

#### **1** 4.1.4 **Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo**

Estimasi pelaksanaan ialah perpanjangan diantara persiapan penting dan tanggung jawab asosiasi Perangkat Daerah. Diknyatakan berhasil apabila indikator yang ditetapkan telah menghasilkan tercapainya tujuan dan sasaran. Mencari pembenaran logis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah sangatlah sulit karena tidak adanya pengukuran **1** kinerja. **Capaian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo** digunakan untuk mengukur kinerja dengan cara membandingkan kondisi sebenarnya yang diukur pencapaiannya dengan tingkat pencapaian target setiap indikator kinerja.

Pada pertengahan tahun pelaksanaan, kinerja jangka menengah diukur melalui perbandingan target pencapaian dengan merealisasi sasaran kinerja pada tahun berikutnya, dimulai pada tahun pertama renstra dan diakhiri pada tahun terakhir. Membandingkan pencapaian target dengan realisasi target kinerja yang diukur setiap tahun sejak awal tahun hingga akhir periode renstra merupakan cara pengukuran kinerja tahunan. Dari penilaian menjelang berakhirnya masa penyusunan rencana strategis 2016-2021, terdapat informasi

mengenai kegagalan/kekurangan kinerja pelaksanaan PD pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Bidang Kepemudaan

Gedung graha pemuda pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata belum dimanfaatkan secara maksimal. Pandemi Covid-19 telah menggeser fokus anggaran, namun selain itu, ada beberapa kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana secara maksimal.

2. Bidang Keolahragaan

Karena inovasi dan kreativitas olahraga belum digalakkan, branding acara masih kurang menarik bagi penonton pertandingan. Pandemi Covid19 menyebabkan beberapa kegiatan berkelompok tidak dapat dilakukan maka tidak bisa memenuhi target prestasi dalam kerangka olahraga tersebut.

3. Bidang Pariwisata

Di Kabupaten Sidoarjo, kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata masih kurang, khususnya dalam hal informasi destinasi. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya masyarakat yang berminat mengunjungi Kabupaten Sidoarjo. Sebab, tidak ada data yang pasti mengenai keberatan dan keberatan Sidoarjo yang tiada tandingannya. Belum adanya fasilitas penunjang seperti toilet umum atau lobi istirahat sebagai tempat berteduh saat tamu kelelahan, serta fasilitas penataan yayasan seperti akses masuk ke lokasi wisatanya masih belum memadai. Jalan menuju destinasi wisata agak macet, dan beberapa jalan

tampak sempit. UMKM dan industri kreatif tidak bisa menjual produk

lokal yang memenuhi kebutuhan belanja pengunjung.

Berikut Rencana Program <sup>1</sup> Rancangan Rencana Strategi Dinas

<sup>1</sup> **Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 2021-2026:**

**Tabel 4.2 Rancangan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 2021-2026**

Indikator Kinerja Program	Data Capaian 16 wial Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>Bidang Kepemudaan</b>											
Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	19	20	12,9 83,0 63,4 98	25	15,56 6,102 ,295	30	17,58 0,741 ,763	35	19,20 1,508 ,664	40	21,53 6,819 ,313
<b>Bidang Olahraga dan Tata Usaha</b>											
Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan <sup>3</sup> Internasional	75	75	20,5 69,0 83,4 01	80	23,64 3,641 ,486	85	25,22 2,765 ,675	90	27,06 3,00. 482	96	28,75 9,316 ,213
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap layanan kesekretariatan	90%	90%	12,8 13,8 42,0 18	90%	13,00 4,769 ,296	90%	13,68 6,860 ,278	90%	14,53 1,004 ,207	90%	15,12 9,011 ,561
<b>Bidang Pariwisata</b>											
Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Sidoarjo	870,060	904,862	1,64 9,45 2,51 9	939,664	2,240 ,176, 666	974,467	3,026 ,783, 009	1,000,569	3,619 ,821, 390	1,026,671	4,059 ,827, 973
Jumlah industri / usaha kreatif pendukung sektor pariwisata	25	25	1,29 0,49 1,87 0	28	1,459 ,900, 54	31	1,631 ,073, 804	34	1,806 ,668, 584	37	1,986 ,880, 434

Berdasarkan tabel di atas, dari data capaian awal perencanaan tahun 2020, dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Seperti pada program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemuda berprestasi dari perencanaan sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 19 kegiatan, dan dapat terealisasi sebanyak 20 kegiatan yang menghabiskan anggaran Rp 12.983.063.498. Pencapaian target juga terjadi pada indikator-indikator program kerja lain.

Namun. Masih ada beberapa program yang telah direncanakan <sup>1</sup> Dinas **Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo** dan tidak dapat tercapai di tahun 2022. Seperti kegiatan even olahraga rekreasi dari 10 event yang ditargetkan, hanya dapat terealisasi sebanyak 5 event, event olahraga prestasi dan olahraga lainnya dari total 4 event yang ditargetkan pada tahun 2022 tidak ada event yang terealisasi, serta terjadi penurunan target kepuasan masyarakat dimana pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 90% dan dari hasil survey SKM hanya tercapai 82%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada program kegiatan sebagai penerapan strategi dan arah kebijakan RPJMD yang belum terealisasi secara maksimal.

Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo masih mendapatkan tantangan karena disetiap periode masih belum dapat secara maksimal prestasi dibidang <sup>1</sup> **olahraga baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional**. Berdasarkan KLPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, Diketahui perkembangan prestasi pemuda, juga mengalami peningkatan <sup>1</sup> **baik di tingkat nasional** maupun **internasional**. Jumlah prestasi olahraga pada 2019

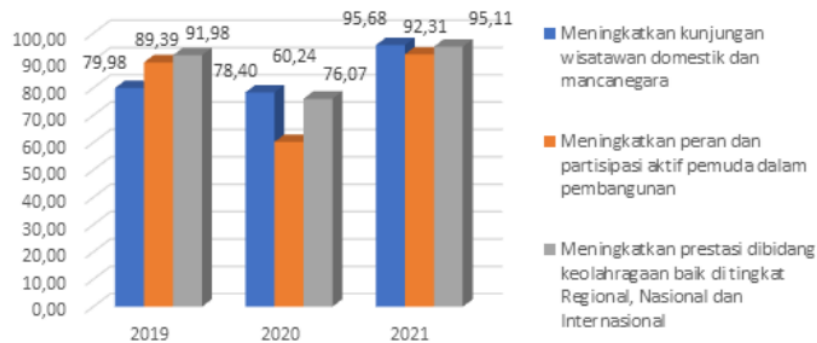
sebanyak 166, lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 berjumlah 282. Penurunan jumlah pemuda berprestasi juga terjadi di tahun 2020 berjumlah 73 dari target yang direncanakan sebesar 155.

## 4.2 Hasil Analisis Data

Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran di <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Pengaruh tersebut diketahui dengan memperhatikan tingkat efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi dengan <sup>70</sup> selama pandemi Covid-19. Pada penelitian ini periode penelitian menggunakan tahun 2019 hingga tahun 2022. Sebelum pandemi Covid-19 menggunakan nilai tingkat efektivitas penyerapan anggaran tahun 2019, sedangkan setelah pandemi Covid-19 menggunakan nilai tingkat efektivitas penyerapan anggaran tahun 2020 hingga 2022.

### <sup>4</sup> 4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif guna menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran dari <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat tiga program kerja yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Program kerja tersebut adalah meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, meningkatkan peran serta partisipasi aktif pemuda dalam membangun dan meningkatkan <sup>1</sup> prestasi di bidang keolahragaan baik ditingkat regional, nasional, dan internasional. Hasil perhitungan tingkat efektivitas untuk ketiga program tersebut dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ditunjukkan melalui <sup>43</sup> Gambar 4.2 berikut.



Sumber: Data primer, diolah.

**Gambar 4.3 Perbandingan Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 hingga 2021**

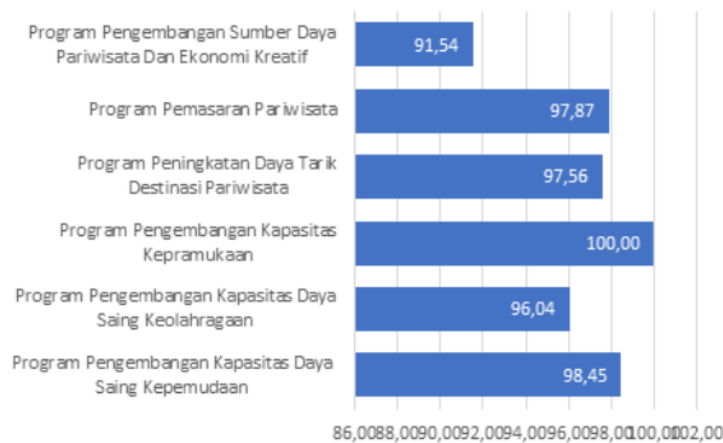
Berdasarkan pada perhitungan tingkat efektivitas penyerapan anggaran yang telah dilakukan dan ditunjukkan pada Gambar 4.2 diketahui bahwa:

1. Pada program meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di tahun 2019 sebesar 79,98 persen atau menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran termasuk dalam kategori kurang baik. Nilai efektivitas tersebut menunjukkan penurunan ketika pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020 menjadi 78,40% tergolong kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efektivitas mengalami peningkatan menjadi 95,68 persen atau termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya beberapa upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melakukan berbagai pembatasan aktivitas sosial, berdampak pada meningnya penyerapan anggaran. Peningkatan digunakan untuk menunjang daya serap hotel.

2. Pada program <sup>68</sup> meningkatkan peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di tahun 2019 sebesar 89,39 persen yang menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran termasuk pada kategori baik. Namun ketika <sup>59</sup> pandemi Covid-19 muncul di 2020 mengalami penurunan tingkat efektivitas yang cukup besar menjadi 60,24 persen atau termasuk dalam kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efektivitas penyerapan anggaran untuk program tersebut mengalami peningkatan menjadi 92,31 persen atau termasuk dalam kategori baik.
3. Pada program meningkatkan prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat regional, nasional sertainternasional di tahun 2019 sebesar 91,98 persen yang menunjukkan efisien penyerapan anggaran termasuk pada kategori baik. Ketika pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020, juga mengalami dampak menjadi turun di angkat 76,07% tergolong kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efisien penyerapan anggaran untuk program tersebut mengalami peningkatan menjadi 95,11 persen atau termasuk dalam kategori baik. Mengacu pada grafik diketahui bahwa terjadi peningkatan penyerapan anggaran program, dimana peningkatan juga akibat meningkatnya kebutuhan peserta kegiatan atas adanya wabah pandemic, seperti dengan kebutuhan alat pelindung diri, penyediaan sarana dan prasana untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan kebutuhan anggaran mengalami peningkatan.

Pada tahun 2022, <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memiliki enam bentuk program mencakup program pengembangan

kemampuan persaingan **kepemudaan**, Program meningkatkan persaingan olahraga, program peningkatan kapasitas kepramukaan, program **meningkatkan daya tarik destinasi wisata**, pemasaran pariwisata, **pengembangan sumber daya pariwisata** serta pembinaan **ekonomi kreatif** merupakan contoh program pengembangan kapasitas. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk keenam program tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.4 berikut.



Sumber: Data primer, diolah.

**Gambar 4.4 Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (selama pandemi Covid-19)**

Pada Gambar 4.4 diketahui bahwa dari keenam program yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020, program yang menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi terdapat pada program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan nilai efektivitas 100 persen atau termasuk dalam kategori baik. Apabila diperhatikan dari pagu anggaran untuk program tersebut Rp 1.200.000.000 dan dapat direalisasikan seluruhnya. Program



tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Program yang menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran terendah adalah pada program mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan nilai sebesar 91,54 persen yang termasuk dalam kategori baik. Apabila diperhatikan dari pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 560.402.626 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 513.012.321. Program tersebut adalah untuk mendukung pengembangan industri kreatif sektor pariwisata dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia dan kapasitas dari ekonomi kreatif di sektor pariwisata di Kabupaten Sidoarjo.

#### 4.2.2 Uji Asumsi

Pada penelitian ini dilakukan uji beda guna mengetahui adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Sebelum dilakukannya uji beda terdapat uji asumsi yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas. Hasil uji asumsi normalitas ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas *Saphiro Wilk***

		Saphiro Wilk		
		Statistik	df	Sig.
Efektivitas penyerapan anggaran	Sebelum pandemi	0,903	3	0,395
	Selama pandemi	0,766	12	0,004

Sumber: data primer, diolah.

Uji normalitas dilakukan menggunakan *Saphiro Wilk*, yang menunjukkan hasil pada Tabel 4.2 bahwa nilai signifikansi untuk efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi sebesar 0,395. Nilai signifikansi yang ditunjukkan lebih besar (>) dari nilai kritis 0,05. Maka bisa dijelaskan data efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019 terdistribusi normal. Pada data efektivitas penyerapan anggaran selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai signifikansi 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah (<) dari nilai kritis 0,05. maka data efektivitas penyerapan anggaran selama pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 tidak terdistribusi normal.

Hasil uji homogenitas yang telah dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas**

Variabel	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Efektivitas penyerapan anggaran	1,008	1	13	0,334

Sumber: data primer, diolah.

Hasil uji homogenitas pada Tabel 4.3 menandakan nilai signifikansi 0,334. Nilai signifikansi tersebut lebih besar (>) dari nilai kritis sebesar 0,05. Hasil ini menjelaskan terdapat homogenitas varians pada data efektivitas penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis untuk uji normalitas maka kesimpulannya data penelitian tidak terdistribusi normal namun homogen. Dikarenakan distribusi data efektivitas penyerapan anggaran tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis dilanjutkan dengan statistik non parametrik uji beda, yaitu menggunakan *Mann Whitney Test*.

### 4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi, diketahui data efektivitas penyerapan anggaran tidak terdistribusi normal, sehingga uji hipotesis dilakukan dengan statistik non parametrik uji beda. Uji beda dengan statistik non parametrik dilakukan *Mann Whitney Test*. Hasil uji *Mann Whitney Test* ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4 Hasil Uji *Mann Whitney Test***

		<i>Mean Ranks</i>	<b>Sig.</b>
	Sebelum Pandemi Covid-19	5,33	0,248
	Selama Pandemi Covid-19	8,67	
	Efektivitas penyerapan anggaran		

Sumber: data primer, diolah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.4 diketahui nilai signifikansi yang ditunjukkan 0,248. Nilai signifikansi tersebut lebih besar (>) dari nilai kritis 0,05. Hasil ini menjelaskan tidak ada perbedaan efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Hasil ini menerangkan bahwa tingkat efektivitas yang dilakukan cenderung sama meskipun terjadi Covid-19 atau dapat dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Efektivitas Penyerapan Anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo cenderung menunjukkan tren yang positif selama tahun 2019 hingga tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020, atau awal masuk Covid-19 di Indonesia memberikan dampak cukup besar pada penurunan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan pada tahun 2020, tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk setiap program dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penurunan hingga tergolong kategori kurang baik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menjalankan keseluruhan rencana penyerapan anggaran yang telah disusun. Padahal anggaran sendiri merupakan dasar bagi instansi pemerintah untuk dapat mengendalikan kinerja dari sebuah instansi (Paat, Nangoi, dan Pusung, 2019).

Pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2021 dan 2022, program yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan efektivitas penyerapan anggaran dan termasuk dalam kategori baik. Menurut Prasetyo dan Nugraheni (2020), sebuah instansi memiliki efektivitas penyerapan anggaran yang baik apabila setiap kegiatan yang sudah direncanakan bisa terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Kondisi

demikian masih dapat dilakukan oleh <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo meskipun berada <sup>45</sup> pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui selama masa pandemi Covid-19, diterapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi aktivitas di dalam instansi dan mendorong untuk melakukan semua aktivitas dari rumah atau WFH. Hal ini menimbulkan berbagai bentuk penghematan dalam penyerapan anggaran. <sup>22</sup> Menurut Suyitno (2020), terdapat berbagai dampak positif dari adanya pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran di sebuah instansi. Dampak positif yang dimaksud seperti penghematan biaya perjalanan dinas, penggunaan ruangan kerja berkurang karena koordinasi dilakukan secara daring, mengurangi biaya konsumsi karena jarang melakukan pertemuan, hingga penghematan pada operasional perkantoran.

Berbagai bentuk penghematan tersebut membuat <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memiliki anggaran yang lebih untuk dapat dialokasikan pada program utama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan efektif karena pada awal tahun 2020, tingkat efektivitas yang ditunjukkan mengalami penurunan. Kondisi demikian karena banyak kegiatan yang tertunda juga akibat pandemi Covid-19 (Suyitno, 2020).

#### **4.3.2 Perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di <sup>7</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo <sup>32</sup> sebelum dan selama Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diselesaikan diketahui tidak ada perbedaan signifikan pada efektivitas penyerapan anggaran di <sup>2</sup> Dinas Kepemudaan,

Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo baik itu sebelum pandemi dan setelah <sup>48</sup> pandemi Covid-19. Hasil ini menerangkan bahwa tidak terdapat pengaruh pandemi Covid-19 dengan efektivitas penyerapan anggaran di <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menjelaskan baik sebelum pandemi dan <sup>2</sup> selama pandemi Covid-19 efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tetap tinggi. Meskipun pada awal kemunculan Covid-19, efektivitas penyerapan anggaran mengalami penurunan nilai hingga menjadi kategori kurang baik. Namun hal ini dapat alokasikan lebih baik dengan peningkatan nilai efektivitas penyerapan anggaran di tahun 2021 dan 2022.

Menurut Suyitno (2020), kondisi demikian dapat terjadi karena instansi dapat beradaptasi <sup>53</sup> dengan perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Perubahan yang dimaksud juga dapat berupa pergeseran anggaran program yang cenderung diprioritaskan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Putra & Dhiniharitsa, (2020), menambahkan bahwa kondisi demikian juga menunjukkan bahwa instansi dapat mengoptimalkan setiap anggaran yang disediakan melalui *recofussing* atau realokasi anggaran.

#### 4.4 Implikasi Penelitian

<sup>73</sup> Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka implikasi <sup>73</sup> dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat efektifitas penyerapan anggaran <sup>28</sup> pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022

cenderung fluktuatif. Terkait demikian, diperlukan evaluasi dan perencanaan program yang jelas setiap periodenya agar Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Penyerapan anggaran yang efektif juga mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber dana untuk kepentingan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang capaian untuk tahap selanjutnya sesuai dengan arah kebijakan umum untuk tahun 2023.
3. Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas <sup>58</sup> sebelum dan sesudah <sup>27</sup> pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa <sup>1</sup> Dinas <sup>12</sup> Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo konsisten dalam penerapan sesuai dengan RPJMD yang sudah ditentukan. Implikasi dalam penelitian ini kepala <sup>1</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga dan <sup>12</sup> Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk profesional dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, guna mempertahankan dan efektivitas penyerapan anggaran, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat

## <sup>12</sup> BAB V

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas pada, maka simpulan dari penelitian ini ialah.

1. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk setiap program yang dilakukan cenderung menunjukkan penurunan dan masuk dalam kategori efektivitas yang kurang baik, karena awal pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan efektivitas yang meningkat dan termasuk dalam kategori baik untuk setiap program yang dilakukan.
2. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan tingkat efektivitas di tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 dengan tahun 2020 hingga tahun 2022 yang merupakan tahun masa pandemi Covid-19. Hal ini menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat beradaptasi dan berjalan efektif baik sebelum dan selama pandemi Covid-19.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini ialah.

1. Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo



- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada 2022 program <sup>65</sup> terkait pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan efektivitas penyerapan paling rendah. Dilain sisi program tersebut merupakan program utama, berbanding terbalik dengan program pengembangan kapasitas kepramukaan yang menunjukkan efektivitas 100% padahal merupakan bukan merupakan program utama. Oleh karena itu, pihak <sup>57</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat berkoordinasi lebih baik dengan instansi terkait untuk mendahulukan program utama atau inti agar <sup>9</sup> penyerapan anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai output yang diharapkannya.
- b. Hasil penelitian menandakan tidak ada perbedaan yang nyata pada tingkat efektivitas penyerapan anggaran <sup>32</sup> sebelum dan selama pandemi Covid-19. Hasil ini menjelaskan bahwa penyerapan anggaran berada pada kondisi baik meskipun terdapat guncangan dari pandemi Covid-19. Maka efektivitas penyerapan anggaran dapat dipertahankan dan dapat merancang program berdasarkan isu yang berkembang dengan disesuaikan urgensi dari isu atau masalah kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagi Penelitian selanjutnya
- Penelitian berikutnya bisa memperluas topik penelitian dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di <sup>2</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten. Faktor yang dapat diteliti

seperti perencanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, hingga pelaksanaan anggaran.

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://disporapar.sidoarjokab.go.id">disporapar.sidoarjokab.go.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.sidoarjokab.go.id">www.sidoarjokab.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://bappeda.jemberkab.go.id">bappeda.jemberkab.go.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://jurnal.utu.ac.id">jurnal.utu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
13	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
19	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %

21	<a href="http://repo.darmajaya.ac.id">repo.darmajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repository.stiemj.ac.id">repository.stiemj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
25	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
26	<a href="http://erepo.unud.ac.id">erepo.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://sidali.sidoarjokab.go.id">sidali.sidoarjokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://ejournal.ipdn.ac.id">ejournal.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repositori.ukdc.ac.id">repositori.ukdc.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	Husni Mubarak, Liska Rahmadani. "Efektivitas Anggaran Penanganan Sampah Pasca Covid-19 Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020", Jurnal	<1 %

# IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2022

Publication

---

32 [repositori.uin-alauddin.ac.id](https://repositori.uin-alauddin.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

33 Submitted to iGroup <1 %  
Student Paper

---

34 [sintang.go.id](https://sintang.go.id) <1 %  
Internet Source

---

35 Submitted to Universitas Nasional <1 %  
Student Paper

---

36 [jpi.api-himpsi.org](https://jpi.api-himpsi.org) <1 %  
Internet Source

---

37 [lib.ibs.ac.id](https://lib.ibs.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

38 [ejournal.iaifa-kediri.ac.id](https://ejournal.iaifa-kediri.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

39 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar <1 %  
Student Paper

---

40 [jdih.banyuwangikab.go.id](https://jdih.banyuwangikab.go.id) <1 %  
Internet Source

---

41 [mistar.id](https://mistar.id) <1 %  
Internet Source

---

[orpegbag.bojolali.go.id](https://orpegbag.bojolali.go.id)

42

Internet Source

&lt;1 %

43

[repository.umi.ac.id](https://repository.umi.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

44

[repository.upi.edu](https://repository.upi.edu)

Internet Source

&lt;1 %

45

[www.researchgate.net](https://www.researchgate.net)

Internet Source

&lt;1 %

46

Bagas bagas Johantri. "Penawaran Harga Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Era Pandemi (Studi Empiris Pada Kementerian Keuangan)", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2021

Publication

&lt;1 %

47

Dewi Hernikawati. "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Kunjungan pada Situs E-Commerce di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2021

Publication

&lt;1 %

48

Hanok Mandaku. "EVALUASI KINERJA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI BARANG ANTAR PULAU SAAT PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI MALUKU", ARIKA, 2020

Publication

&lt;1 %

49	Ika Sartika, Puji Wibowo. "Penyajian Dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2021 Publication	<1 %
50	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
51	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
52	id.scribd.com Internet Source	<1 %
53	jeparakab.bps.go.id Internet Source	<1 %
54	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
55	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.scilit.net Internet Source	<1 %
58	Aditya Amanda Pane, Sari Nuzullina Rahmadhani, Hasbiana Dalimunthe. "Predicting Financial Distress on	<1 %



# Transportation Company Before and Under Pandemic Covid-19 in Indonesia", Owner, 2022

Publication

59

Muhammad Hamdan Sayadi. "APBN 2020: ANALISIS KINERJA PENDAPATAN NEGARA SELAMA PANDEMI COVID-19", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021

Publication

<1 %

60

[arsipjdih.jatimprov.go.id](http://arsipjdih.jatimprov.go.id)

Internet Source

<1 %

61

[disporapar.kabpaser.com](http://disporapar.kabpaser.com)

Internet Source

<1 %

62

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

Internet Source

<1 %

63

[jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id](http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id)

Internet Source

<1 %

64

[prosiding.unipma.ac.id](http://prosiding.unipma.ac.id)

Internet Source

<1 %

65

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

66

[reportersatu.com](http://reportersatu.com)

Internet Source

<1 %

67

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

68	<a href="http://ugm.ac.id">ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://www.nganjukkab.go.id">www.nganjukkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.riset.unisma.ac.id">www.riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://ejurnal.its.ac.id">ejurnal.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
73	Dharma Setyawan, Fina Sundari. "MARKETING DIGITAL WISATA PINUS ECOPARK DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI LAMPUNG BARAT", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2020 Publication	<1 %
74	<a href="http://repository.dinamika.ac.id">repository.dinamika.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On